

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

China dan Taiwan terikat oleh pemahaman yang dikenal sebagai Konsensus 1992 yang dicapai antara perwakilan Partai Komunis China dan partai Kuomintang Kedua belah pihak mengatakan mereka mewakili seluruh China secara politik sesuai dengan apa yang mereka pertentangkan dan perjuangkan sejak tahun 1949.<sup>1</sup> China terus menekankan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya bahwa China dan Taiwan yang diwujudkan dalam Konsensus 1992 membentuk dasar hubungan bahwa China akan terus mengejar penyatuan.<sup>2</sup> Taiwan dan China secara historis China menganggap Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya. Namun disintegrasi yang sempat dialami Taiwan tidak merasa sebagai bagian dari China. Meskipun Taiwan menganggap dirinya sebagai negara berdaulat China akan selalu menganggap bahwa Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri.<sup>3</sup> Oleh karena itu kepentingan penyatuan harus segera dilakukan karena apabila kehilangan Taiwan maka akan memberikan pengaruh yang signifikan dan kompleks bagi China.<sup>4</sup>

Pada November 2013 awal masa kepemimpinan Presiden Xi Jinping

---

<sup>1</sup> Sherridan, I. (2018). Hubungan China dan Taiwan dalam Hal Status Kedaulatan Negara Taiwan.

<sup>2</sup> Thompson, D. (2020). The Rise of Xi Jinping and China's New Era: Implications for the United States and Taiwan. *Issues & Studies*, 56(01), 2040004.

<sup>3</sup> BBC, 'China-Taiwan military tensions 'worst in 40 years' (daring), < <https://www.bbc.com/news/world-asia-58812100> >, diakses pada 27 Maret 2022, 12:00 WITA.

<sup>4</sup> Dewi, I. F., & Dewi, K. U. (2019). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168.

meluncurkan kebijakan yang agresif terhadap Taiwan ia mendeklarasikan zona identifikasi pertahanan udara di beberapa bagian Laut Cina Timur yang memicu ketegangan dengan Taiwan.<sup>5</sup> Kebijakan yang dikeluarkan oleh China terhadap Taiwan masih terus deselerasikan dengan kekuatan China sehingga isu kemerdekaan Taiwan menjadi isu selalu menjadi alasan dalam ketegangan yang ada antara China dan Taiwan.<sup>6</sup> China di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah menggunakan berbagai taktik dalam menjaga stabilitas hubungan terhadap Taiwan sejak terpilihnya Tsai Ing-Wen menjadi presiden Taiwan. Xi Jinping memandang Tsai sebagai separatis yang bertekad pada kemerdekaan formal untuk Taiwan tidak ingin menjadi bagian dari Republik Rakyat China, menolak konsep *One Country, Two System* China<sup>7</sup> rezim Taiwan saat ini belum mendukung *One China Policy* secara terbuka,<sup>8</sup> Serta kedekatan hubungan Amerika Serikat dan komitmennya dalam mendukung Taiwan. Sebagai respon China telah meningkatkan frekuensi dan skala patroli pembom PLA, jet tempur, dan pesawat pengintai di sekitar Taiwan China juga semakin banyak mengarungi kapal perang dan kapal induknya melalui Selat Taiwan untuk menegaskan kembali sikap China yang semakin tegas dan agresif terhadap Taiwan melalui upaya militer untuk

---

<sup>5</sup> Al Syahrin, M. N. (2018). Kompleksitas Keamanan Kawasan dan Tantangan Kerja Sama Keamanan Asia Timur. *Nation State: Journal of International Studies*, 1(1), 24-44.

<sup>6</sup> Prasetya, D. M. (2012). Strategi Defensif China dalam Merespon Kebijakan Amerika Serikat atas Taiwan. *MEJ (Mathematics Education Journal)*, 2(1).

<sup>7</sup> Khomarul Hidayat, 'Memanas, Taiwan tolak tawaran satu negara dua sistem, China: Reunifikasi harga mati' (daring), < <https://internasional.kontan.co.id/news/taiwan-tolak-tawaran-satu-negara-dua-sistem-china-reunifikasi-tak-bisa-dihindari> >, diakses pada 02 April 2022, 21:30 WITA.

<sup>8</sup> Sarkar, M. G. (2020). Xi Jinping's PLA and China's regional security ambitions. In *Chinese Politics and Foreign Policy under Xi Jinping* (pp. 276-306). Routledge.

mencegah Taiwan melakukan kampanye atau mempromosikan kemerdekaan.<sup>9</sup>

Tekanan politik dan militer yang diberikan China terhadap Taiwan sepanjang masa kepemimpinan Tsai Ing-wen semakin intensif.<sup>10</sup> Bagi Xi Jinping Taiwan tetap menjadi bagian penting dari Impian China, peremajaan nasional, dan penyatuan dengan Taiwan tetap dikemas dalam visi Xi untuk negara. Oleh karena itu China di bawah Xi kemerdekaan Taiwan telah menerima postur yang jauh lebih keras karena penyatuan menjadi bagian penting dari agenda ambisius Xi sebagai pemimpin China.<sup>11</sup> Xi Jinping mengatakan bahwa masalah Taiwan tidak dapat ditunda dari satu pemimpin generasi ke generasi lainnya. Mengingat bahwa pemerintahan Xi lebih memilih strategi yang lebih proaktif untuk penyatuan dan dapat secara bertahap memberlakukan dukungan terhadap aktor Taiwan pro-China yang dapat melaksanakan agenda politik China secara lebih langsung.<sup>12</sup> Karena China telah berkembang kekuatan di kawasan Asia Timur dalam beberapa tahun terakhir jika pemerintahan Xi mengambil tindakan intrusif untuk menyatukan Taiwan atau jika pemerintahan pro-China mengambil alih kekuasaan di Taiwan dengan terus menjaga stabilitas

---

<sup>9</sup> David Brown, 'China and Taiwan: A really simple guide to a growing conflict' (daring), < <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59900139> > diakses pada 29 Maret 2022, 03:22 WITA.

<sup>10</sup> 'China Makin Agresif, Taiwan Bisa Apa?' (daring), Inews Indonesia, < <https://www.inews.id/news/internasional/china-makin-agresif-taiwan-bisa-apa> > diakses pada 02 April 2022, 00:37 WITA.

<sup>11</sup> Bush, R. C. (2017). What Xi Jinping said about Taiwan at the 19th Party Congress. *Brookings Institution*, 19.

<sup>12</sup> Reuters, 'Blinken warns of China's 'increasingly aggressive actions' against Taiwan' (daring), < <https://www.reuters.com/world/china/blinken-warns-chinas-increasingly-aggressive-actions-against-taiwan-2021-04-11/> >, diakses pada 27 Maret 2022, 20:56 WITA.

hubungan China-Taiwan.<sup>13</sup>

Strategi-strategi kebijakan luar negeri serta agenda-agenda politik agresif China dibawah Xi Jinping terhadap Tiawan juga tidak terlepas dari posisi penting Taiwan yang terletak di lepas pantai China dan antara Timur Laut dan Asia Tenggara telah melayani berbagai tujuan strategis bagi kekuatan regional baik ofensif maupun defensif. Di era kontemporer Taiwan secara geografis tetap berada di persimpangan sebagian besar titik bahaya Asia Timur. Bahkan konflik di Semenanjung Korea dapat dipengaruhi oleh operasi yang mungkin diluncurkan dari Taiwan. Taiwan merupakan aset strategis yang berharga bagi agresor potensial di Asia Timur saat ini.<sup>14</sup> Adanya upaya-upaya yang dilakukan Xi Jinping dalam mempertahankan Taiwan serta melalui kebijakan luar negeri yang lebit tegas dengan membuat opsi bahwa penyatuan China merupakan hal terbaik bagi China maupun Taiwan. Xi dengan ini melihat bahwa Taiwan merupakan titik strategis bagi China melihat nilai strategis Taiwan sebagai dari berbagai kepentingan China. Tujuan China mengenai Taiwan jelas bersifat revisionis, Ia ingin mengakhiri keberadaan Taiwan yang terpisah dan memasukkannya dalam kesatuan Republik Rakyat China.<sup>15</sup> Berdasarkan paparan latar belakang diatas,

---

<sup>13</sup> 'A New Level of Aggressiveness: Recent Changes in Xi Jinping's Formulation of Taiwan Policy,' Georgetown Journal Of International Affairs (daring), 06 Mei 2019, < <https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/2019/5/3/a-new-level-of-aggressiveness-recent-changes-in-xi-jinpings-formulation-of-taiwan-policy-1> >, diakses pada 27 Maret 2022, 02:00 WITA.

<sup>14</sup> Josep A. Bosco, 'Taiwan and Strategic Security: The U.S. declarative policy on Taiwan of "strategic ambiguity" needs to change sooner rather than later,' (daring) 15 Mei 2015 < <https://thediplomat.com/2015/05/taiwan-and-strategic-security/> >, diakses pada 26 Maret 2022, 22:21 WITA.

<sup>15</sup> Bush, R. (2019). *From persuasion to coercion: Beijing's approach to Taiwan and Taiwan's response*. Washington, DC: Brookings Institution.

penelitian ini akan menganalisa tentang Pengaruh Agresifitas Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: **Mengapa Ketegasan Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Berpengaruh Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan?**

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan**

Mengacu dari pada rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan orientasi Pengaruh Agresifitas Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan. China dibawah Xi Jinping dalam Kebijakan Luar Negerinya terhadap menjaga stabilitas hubungan China-Taiwan. Hal ini juga bergantung pada pengaruh dari pengambil kebijakan serta bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh negara tersebut.

### **1.3.2 Manfaat**

#### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

Dari penelitian ini secara akademis akan memberikan pengetahuan baru terkait Pengaruh Agresifitas Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan. Serta menjadi pembelajaran bagi penulis maupun pembaca dalam menganalisis suatu fenomena masalah.

### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini akan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca untuk menemukan pembelajaran baru terkait bagaimana sebuah negara dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang solid untuk negaranya. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan komperatif bagi penelitian sejenis, dan aspek-aspek yang belum diketahui dan terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

## **1.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini akan menganalisa tentang Pengaruh Agresifitas Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan. Dalam memudahkan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa rujukan dari penelitian beberapa sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang sebelumnya yang saya jadikan rujukan:

Rujukan jurnal pertama berjudul **“Xi Jinping’s PLA and China’s regional security ambitions”** ditulis oleh Mrittika Guha Sarkar. Dalam tulisan ini membahas mengenai Xi Jingping mereformasi keyakinan Mao pada Siapa pun yang memiliki tentara memiliki kekuatan China serta tatanan global melalui PLA dan diplomasi militernya. Mengemas dari pendahulunya sembunyikan dan tunggu Deng Xiaoping. China di bawah Xi Jinping semakin memandang diplomasi militernya sebagai alat vital untuk memajukan tujuan politiknya, menjaga keamanan nasionalnya, dan mencapai Mimpi China. Dalam hal ini Xi pada 1 Agustus 2016 mengumumkan reformasi PLA baik secara struktural maupun organisasi sebagai bagian integral dari keseluruhan proses reformasi struktural ini.

Xi menetapkan pasukan darat PLA sebagai kekuatan militer yang perkasa, modern, dan bergaya baru. Dia lebih lanjut mempercepat pergeseran PLA dari kekuatan tradisional berbasis darat ke kekuatan angkatan laut.

Ini terutama terlihat dalam pembangunan PLA Navy (PLAN); Strategi diplomasi lepas pantai China dalam konteks Belt and Road Initiative (BRI); dan upaya pemaksaannya untuk mencapai reunifikasi penuh dengan Taiwan; reklamasi pulau-pulau di ECS dan LCS; dan upayanya untuk menjaga hukum dan ketertiban di Hong Kong vis-à-vis demonstrasi pro-demokrasi. Visi Xi Jinping tentang era baru PLA yang mendesak untuk memperkuat ketahanannya, kesiapsiagaan, dan meningkatkan kemampuan tempurnya lebih lanjut disaksikan selama pertengkarannya dengan tentara India di Doklam pada tahun 2017. Namun, yang masih belum jelas adalah sejauh mana apakah reformasi dan restrukturisasi PLA terkait dengan kebijakan luar negeri China secara keseluruhan dalam hal konotasi regional serta strategi lingkungan China Selanjutnya, sejauh mana restrukturisasi PLA China terkait dengan jangkauannya, (i) pandangan regional Beijing, (ii) politisasi PLA atas wilayah darat dan laut, (iii) kebijakan penjangkauan ekonomi yang intens pada konektivitas dan koridor Belt and Road Initiative (BRI) transformasi PLA melalui reformasi dan restrukturisasi di bawah Xi Jinping dan berpendapat bahwa hal itu akan memiliki implikasi yang lebih luas. Selanjutnya akan menghubungkan transformasi PLA di bawah Xi dengan keamanan China yang tumbuh dan kepentingan kebijakan luar negeri yang berkembang karena PLA China bertujuan untuk mencapai kekuatan kelas dunia Kebijakan luar negeri China telah menyaksikan sejumlah transisi yang signifikan

karena negaranya berkembang dari masyarakat agraris yang kurang berkembang pasca pembentukan Republik Rakyat China menjadi kekuatan besar dalam skenario saat ini.

Inti dari transisi ini adalah kebangkitan ekonomi China dan baru-baru ini. memperoleh pengaruh strategis. Di bawah Xi Jinping, perkembangan ini telah menopang ide-idenya tentang diplomasi proaktif dan kebijakan luar negeri dan strategi keamanan yang bergerak. Dalam tulisan ini juga membahas mengenai perkembangan PLA dalam diplomasi militer dengan Taiwan yang mana setelah partai DPP yang pro terhadap kemerdekaan yang memimpin. Secara aktif China menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari China dan melakukan beberapa ancaman melalui latihan militer dan melakukan modernisasi senjata yang mana mempengaruhi hubungan intas selat. Pada intinya penyatuan adalah agenda penting bagi China dan Xi dengan damai atau menggunakan kekuatan secara militer serta adanya kekhawatiran mengenai posisi Amerika Serikat yang mendukung Taiwan secara pada intinya modernisasi senja juga di tunjukan untuk mencegah perpecahan Taiwan.<sup>16</sup>

Rujukan jurnal kedua berjudul **“Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok”** ditulis Oleh Inneke Firsana Dewi, Karina Utami, Universitas Islam Indonesia. tulisan ini membahas mengenai dinamika hubungan Tiongkok dan Taiwan yang dimulai dengan perang saudara antara Partai Komunis dan Partai Nasionalis. Presiden Tsai Ing-wen menolak keberadaan Kebijakan Satu Tiongkok (One China Policy) dan

---

<sup>16</sup> Sarkar, M. G. (2020). Xi Jinping’s PLA and China’s regional security ambitions. In *Chinese Politics and Foreign Policy under Xi Jinping* (pp. 276-306). Routledge.



dengan terus memperjuangkan kemerdekaan Taiwan dengan berbagai cara. Sebaliknya, Presiden Xi Jinping dengan tegas menolak kemerdekaan Taiwan dan bersikeras mempertahankan posisi Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan Tiongkok. tulisan ini menganalisis dengan menggunakan konsep sektor keamanan oleh Buzan, Waever, dan de Wilde yang mencakup strategi keamanan sektor militer, politik, dan ekonomi untuk menjelaskan upaya pemerintah Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping dalam menanggapi gerak Taiwan. Menggunakan analisis dari konsep ini dapat dijelaskan bahwa upaya pemerintah Tiongkok di sektor militer dan politik berhasil mengatasi ancaman dari posisi Taiwan; sementara di sektor ekonomi, hasilnya tidak seperti yang diharapkan karena pemerintah Taiwan secara kontinu berupaya untuk tidak bergantung pada ekonomi Tiongkok.<sup>17</sup>

Rujukan jurnal ketiga berjudul **“Xi Jinping and the National Security Commission: policy coordination and political power”** ditulis oleh David M. Lampton. Tuisan ini membahas mengenai alasan dan kemajuan hingga saat ini dari pembentukan Komisi Keamanan Nasional China pada masa kepemimpinan Xi Jinping sebuah langkah yang pertama kali diumumkan pada akhir tahun 2013. Dorongan utama untuk pembentukan Komisi adalah untuk membantu mengoordinasikan birokrasi yang sangat terfragmentasi dengan lebih baik dan untuk memajukan upaya Xi Jinping untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pribadinya atas senjata koersif dan diplomatik internal dan eksternal dari struktur pemerintahan. Tulisan ini juga membahas mengenai fokus permasalahan negara

---

<sup>17</sup> Dewi, I. F., & Dewi, K. U. (2019). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168.

yang merupakan bagian dari China yakni HongKong, Taiwan, Macau. Kemudian ada masalah khusus Taiwan yang secara administratif belum menjadi bagian dari RRC tetapi yang akhirnya bergabung dengan pusat legitimasi rezim. Beberapa dari area ini terus menerus menjadi perhatian center dari produk kebijakan luar negeri China dibawah Xi Jinping.

Semua ini menunjukkan bahwa Xi masih memiliki insentif yang sangat nyata untuk mempertahankan jalinan hubungan yang konstruktif dengan Amerika Serikat khususnya dan lingkungannya bahkan ketika ia secara bersamaan harus tampak berotot pada kepentingan inti dan memperketat politik di dalam negeri. Xi berkomitmen untuk China yang lebih kuat yang memiliki jejak regional dan global yang semakin besar. Dia mendorong Amerika Serikat untuk lebih menghormati apa yang dia lihat sebagai kepentingan China. Dari sudut pandang kepemimpinan Xi tampak bahwa Xi sudah lebih dominan dalam kebijakan luar negeri China daripada dua pendahulunya, bahwa ia memiliki insentif domestik untuk berbicara keras, tegas pada masalah kedaulatan, tetapi tidak mendorong hal-hal eksternal ke arah konflik. Gaya kebijakannya berisiko lebih tinggi daripada pendahulunya dan dia membutuhkan proses pengambilan keputusan keamanan nasional yang efektif untuk membantu menavigasi perairan berbahaya ke depan.<sup>18</sup>

Rujukan jurnal selanjutnya berjudul ***“Xi Jinping’s Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework”*** ditulis oleh jing Huang. Tuisan ini membahas mengenai hubungan Lintas Selat di bawah kepemimpinan Xi Jinping tetap stabil dan progresif secara umum meskipun sentimen anti-Beijing tumbuh di

---

<sup>18</sup> Lampton, D. M. (2015). Xi Jinping and the National Security Commission: policy coordination and political power. *Journal of Contemporary China*, 24(95), 759-777.

Taiwan seperti yang disoroti oleh Gerakan Bunga Matahari yang memprotes pengesahan Perjanjian Perdagangan Jasa Lintas Selat antara Taiwan dan daratan dan kegagalan memalukan dari partai Kuomintang (KMT) yang berkuasa yang telah menekankan platform penguatan hubungan ekonomi Taiwan-China dalam pemilu 2014. Kedua belah pihak telah dicegah untuk membuat kemajuan substansial dalam hubungan lintas-Selat sejak Xi berkuasa pada 2012 (bertepatan dengan masa jabatan kedua Ma) Taiwan dengan menumbuhkan sentimen anti-Beijing, terutama di kalangan anak muda, dan penurunan Presiden Ma Ying-jeou dan China dengan continuo Xi Jinping dengan memerangi korupsi dan merestrukturisasi ekonomi di tengah perlambatan ekonomi yang substansial. Namun perkembangan damai di Selat Taiwan tetap menjadi tren sejak 2008, ketika Ma Ying-jeou berkuasa. Konsensus 1992 bahwa hanya ada satu Cina dan bahwa Taipei dan Beijing setuju untuk tidak setuju tentang pemerintah mana yang merupakan perwakilan sahnya masih merupakan dasar dari hubungan lintas-Selat. Selain itu, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang lebih baik dan toleransi yang semakin besar terhadap pandangan yang berbeda satu sama lain tentang implikasi, di dalam dan luar negeri, dari pernyataan bahwa hanya ada satu China. Sementara itu, pertukaran ekonomi, sosial, dan politik antara kedua belah pihak di Selat Taiwan terus meningkat.

Dalam tulisan ini membahas dengan tinjauan singkat tentang perkembangan hubungan lintas-Selat sejak Ma Ying-jeou berkuasa pada 2008. Kemudian berargumen bahwa meskipun ada perkembangan substansial, status quo tetap utuh. Namun, status quo ini dalam jangka panjang mendukung tujuan

kebijakan Beijing untuk akhirnya menyatukan kembali kedua sisi Selat Taiwan ke dalam Republik Rakyat China. Dalam hal ini, sementara kebijakan Taiwan Xi Jinping terus mengikuti pendekatan mendasar yang diadopsi oleh Hu Jintao yaitu memprioritaskan pencegahan kemerdekaan de jure Taiwan daripada promosi reunifikasi Xi semakin menekankan penguatan kerangka strategis “prinsip satu-China” dalam hubungan lintas selat. Tujuannya adalah untuk memasukkan Taiwan ke dalam tujuan reunifikasi, yang telah dimasukkan ke dalam tujuan besar Xi untuk China yang diungkapkan dalam Mimpi Chinanya. Meskipun orang Taiwan tampaknya semakin tidak mengidentifikasi diri dengan Tiongkok daratan secara nasional dan politik, Taiwan telah sangat tertarik pada orbit ekonomi Tiongkok, sementara status internasionalnya baik dari segi legitimasi maupun pengaruhnya terus menurun. Dengan demikian Taiwan melihat semakin sulitnya untuk menjauh dari pengaruh China daratan baik secara ekonomi maupun politik. Dilema yang dihadapi Taiwan adalah akan terseret lebih dalam ke orbit China atau terpinggirkan dalam urusan internasional serta integrasi ekonomi regional. Taiwan tidak punya banyak pilihan selain menerima kenyataan bahwa ia akan memiliki ketergantungan yang lebih besar dengan daratan. Saya menyimpulkan bahwa meskipun mungkin ada bouncing atau reaksi terhadap kebijakan Taiwan daratan China setelah pemilihan presiden pada tahun 2016, ini hanya akan menjadi badai di cangkir teh, yang tidak akan mengubah arah pembangunan secara keseluruhan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Huang, J. (2017). Xi Jinping’s Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework. In L. Dittmer (Ed.), *Taiwan and China: Fitful Embrace* (1st ed., pp. 239–248). University of California Press. <http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1w76wpm.16>.

Rujukan jurnal terakhir **“Beijing's policy towards President Tsai Ying-wen and the future of cross-Strait relations”** ditulis oleh JP Cabestan. Tulisan ini membahas mengenai Sejak pemilihan Tsai Ing-wen sebagai Presiden Republik rakyat China dan Taiwan pada 16 Januari 2016 dan bahkan lebih sejak pelantikannya pada 20 Mei 2016 kebijakan Beijing terhadap negara pulau itu kaku dan tegas. Otoritas Republik Rakyat China terus meminta pemerintahan Taiwan yang baru untuk mendukung apa yang disebut konsensus 1992 yang menurutnya ada satu China tetapi tidak ada pihak yang mencoba mendefinisikannya yang bertentangan dengan pihak yang kalah Kuomintang Tsai dan Partainya Partai Progresif Demokratik yang sekarang menguasai mayoritas kursi di Legislatif Yuan atau Parlemen Taiwan tidak akan melakukannya. Akibatnya Partai Komunis China telah memutuskan untuk menghentikan semua kontak tingkat tinggi dengan pemerintah Taiwan dan malah mengintensifkan kebijakan front persatuan yang bertujuan menjangkau segmen-segmen pemerintahan Taiwan dan masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan baru presiden dan KMT dan perwakilan nasional dan lokal terpilih mereka serta komunitas bisnis Taiwan.

Strategi pembagian dan aturan ini dilayani oleh ekonomi yang lebih kuat meskipun tumbuh lebih lambat kebijakan luar negeri yang lebih tegas terutama terhadap Amerika Serikat dan militer yang lebih kuat dan mengancam. Tujuan Beijing cukup jelas dan sederhana berkontribusi pada kegagalan Tsai dalam melemahkan posisinya dan mendelegitimasi pilihan kebijakannya baik di mata politik, elit bisnis dan pemilih Taiwan serta semoga Administrasi Amerika yang baru dan akibatnya membantu KMT dan kubu biru secara keseluruhan untuk

kembali berkuasa pada tahun 2020 dalam mengembangkan hubungan dekat dengan mereka dan sekutu bisnis mereka yang memiliki kepentingan pribadi di atau dengan China. Dalam artikel ini juga membahas mengenai perkembangan terakhir dalam hubungan Lintas Selat melalui lensa asimetri dan rebalancing. Hubungan Beijing-Taipei menjadi semakin asimetris. Sementara asimetri struktural ini telah memungkinkan yang pertama untuk memberikan segala macam tekanan pada yang terakhir ekonomi, ideologis dan militer asimetri ini tidak mencegah yang terakhir dari menjaga beberapa ruang manuver vis-à-vis yang pertama. Menyeimbangkan melawan China dan ikut campur dengan Amerika Serikat, sejak 1950 telah menjadi strategi keamanan dan kelangsungan hidup Taiwan bahkan jika setelah Amerika Serikat tidak mengakui Taiwan pada tahun 1978 Taipei dan Washington tidak dihubungkan oleh aliansi formal tetapi jauh lebih sempit. dan pengaturan keamanan yang tidak jelas Undang-Undang Hubungan Taiwan (TRA).

Dalam tulisan ini berargumen bahwa berargumen bahwa di bawah Pemerintahan Tsai strategi penyeimbangan Taiwan tetap lunak karena ketergantungan ekonomi pulau itu pada China. Pada saat yang sama Taiwan tidak dapat mengabaikan strategi penyeimbangan kembali Pemerintah Amerika Serikat di Asia dan konsekuensinya terhadap hubungan Amerika Serikat-China dan kawasan. Dengan menggunakan pendekatan ganda ini tulisan ini mempresentasikan kebijakan Taiwan baru Beijing. Kemudian mengeksplorasi akar penyebab dan driver utamanya. Dan berspekulasi tentang peluang keberhasilan strategi China terhadap Pemerintahan Tsai terutama setelah Presiden

AS yang baru Donald Trump mulai menjabat dan mengingat panggilan telepon yang diterimanya dengan Tsai pada awal Desember 2016. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah bahwa karena banyak alasan domestik dan internasional ketidakmampuan KMT untuk melakukan reformasi identitas Taiwan yang terkonsolidasi dan kemungkinan berlanjutnya Amerika Serikat dan mungkin dukungan strategis yang lebih kuat dan penyeimbangan kembali keseluruhan di bawah Trump Beijing mungkin tidak akan mencapai tujuannya. Tujuan utama setidaknya pada tahun 2020 Akibatnya Taiwan akan dapat melanjutkan jalannya sendiri; kesenjangan politik antara kedua belah pihak akan terus melebar dan hubungan di Selat Taiwan mungkin akan tetap menjadi campuran ketegangan politik dan mungkin militer serta pertukaran padat dan interaksi yang tak terhindarkan.<sup>20</sup>

Bagian ini merupakan perbandingan penelitian dengan jurnal yang dijadikan rujukan. Perbedaan penulisan dengan rujukan yang pertama berjudul **“Xi Jinping’s PLA and China’s regional security ambitions”** menjelaskan mengenai ambisi Xi Jinping untuk China melalui PLA dalam keamanan regional. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan fokus analisis terhadap **“Pengaruh Ketegasan Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan”** upaya agresifitas Xi Jinping dalam kebijakan luar negerinya terhadap Taiwan dalam stabilitas hubungan China-Taiwan dengan menggunakan *Belief System* dalam menjelaskan kebijakan Xi Jinping terhadap Taiwan. Perbedaan penulisan dengan rujukan yang kedua

---

<sup>20</sup> Cabestan, J. P. (2017). Beijing's policy towards President Tsai Ying-wen and the future of cross-strait relations. *Whitehead J. Dipl. & Int'l Rel.*, 18, 55.

berjudul **“Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok”** dalam tulisan ini membahas bagaimana mempertahankan posisi Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan Tiongkok dibawah pemerintahan Xi. Dengan menggunakan konsep sektor keamanan oleh Buzan, Waever, dan de Wilde yang mencakup strategi keamanan sektor militer, politik, dan ekonomi. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan fokus analisis terhadap **“Pengaruh Ketegasan Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan”** upaya agresifitas Xi Jinping dalam kebijakan luar negerinya terhadap Taiwan dalam stabilitas hubungan China-Taiwan dengan menggunakan *Belief System* dalam menjelaskan kebijakan Xi Jinping terhadap Taiwan. Rujukan ketiga **“Xi Jinping and the National Security Commission: policy coordination and political power”** dalam tulisan ini menjelaskan tentang upaya Xi Jinping dalam membangun komisi keamanan nasional China, arah kebijakan luar negeri, serta kekuatan politik. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan fokus analisis terhadap **“Pengaruh Ketegasan Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan”** upaya agresifitas Xi Jinping dalam kebijakan luar negerinya terhadap Taiwan dalam stabilitas hubungan China-Taiwan dengan menggunakan *Belief System* dalam menjelaskan kebijakan Xi Jinping terhadap Taiwan. Rujukan selanjutnya **“Xi Jinping’s Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework”** dalam tulisan ini menjelaskan hubungan lintas selat dimasa kepemimpinan Ma Ying-jeou, politik, ekonomi, serta upaya dalam



mengurangi pengaruh Amerika Serikat dengan kebijakan *One China* Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan fokus analisis terhadap **“Pengaruh Ketegasan Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan”** upaya agresifitas Xi Jinping dalam kebijakan luar negerinya terhadap Taiwan dalam stabilitas hubungan China-Taiwan dengan menggunakan *Belief System* dalam menjelaskan kebijakan Xi Jinping terhadap Taiwan. Perbedaan rujukan selanjutnya **“China’s Ambitions, America’s Interests, Taiwan’s Destiny, and Asia’s Future”** dalam tulisan ini membahas bagaimana ambisi kebangkitan Tiongkok, kepentingan Amerika Serikat terhadap Taiwan dan kawasan Asia Pasifik serta ketakutanya terhadap perkembangan kekuatan kebangkitan Tiongkok melalui perspektif Realisme. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan fokus analisis terhadap **“Pengaruh Ketegasan Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan”** upaya agresifitas Xi Jinping dalam kebijakan luar negerinya terhadap Taiwan dalam stabilitas hubungan China-Taiwan dengan menggunakan *Belief System* dalam menjelaskan kebijakan Xi Jinping terhadap Taiwan. Rujukan jurnal terakhir **“Beijing's policy towards President Tsai Ying-wen and the future of cross-Strait relations”** Tulisan ini membahas mengenai kebijakan China dan bagaimana hubungan China-taiwan dimasa depan semenjak Tsai Ing-Wen menjadi Presiden Taiwan dan membahas mengenai pengaruh Amerika Serikat di Taiwan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan fokus analisis terhadap **“Pengaruh Ketegasan Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Terhadap**

**Stabilitas Hubungan China-Taiwan”** upaya agresifitas Xi Jinping dalam kebijakan luar negerinya terhadap Taiwan dalam stabilitas hubungan China-Taiwan dengan menggunakan *Belief System* dalam menjelaskan kebijakan Xi Jinping terhadap Taiwan.

## **1.5 Landasan Konsep**

### **1.5.1 Belief System**

Ole Rudolf Holsti mengemukakan tiga komponen persepsi, yakni nilai, keyakinan dan pengetahuan atau fakta. Preferensi terhadap suatu realitas tertentu bila dibandingkan realitas yang lainnya disebut juga dengan nilai. Selanjutnya, sesuatu yang dianggap benar karena telah dapat dibuktikan kebenarannya dan telah diketahui oleh individu disebut dengan keyakinan. Keyakinan sendiri bisa didapatkan dari informasi yang telah diterima sebelumnya oleh individu. Lebih lanjut, pengetahuan atau fakta merupakan serangkaian informasi yang didapatkan dari lingkungan serta menjadi unsur utama dan pembentukan atau perubahan sistem perseptual seseorang.

Holsti dalam karya lainnya berjudul *Making American Foreign Policy* menjelaskan relasi persepsi yang terkait sistem keyakinan, citra serta hubungannya dengan proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pemimpin sedikit banyaknya pasti akan melibatkan keyakinan dirinya sebagai tolak ukur dan media pertimbangan dalam menentukan opsi kebijakan yang hendak ia ambil. Dengan kata lain, keyakinan yang ada di dalam diri seorang pemimpin akan berpengaruh pada keputusannya dalam proses penetapan kebijakan. Lebih lanjut, Holsti mengemukakan pendapatnya soal citra.

Citra yang dimaksud merujuk pada citra yang terbentuk bagi individu maupun negara, yang tentunya juga akan mempengaruhi keputusan seorang pemimpin.

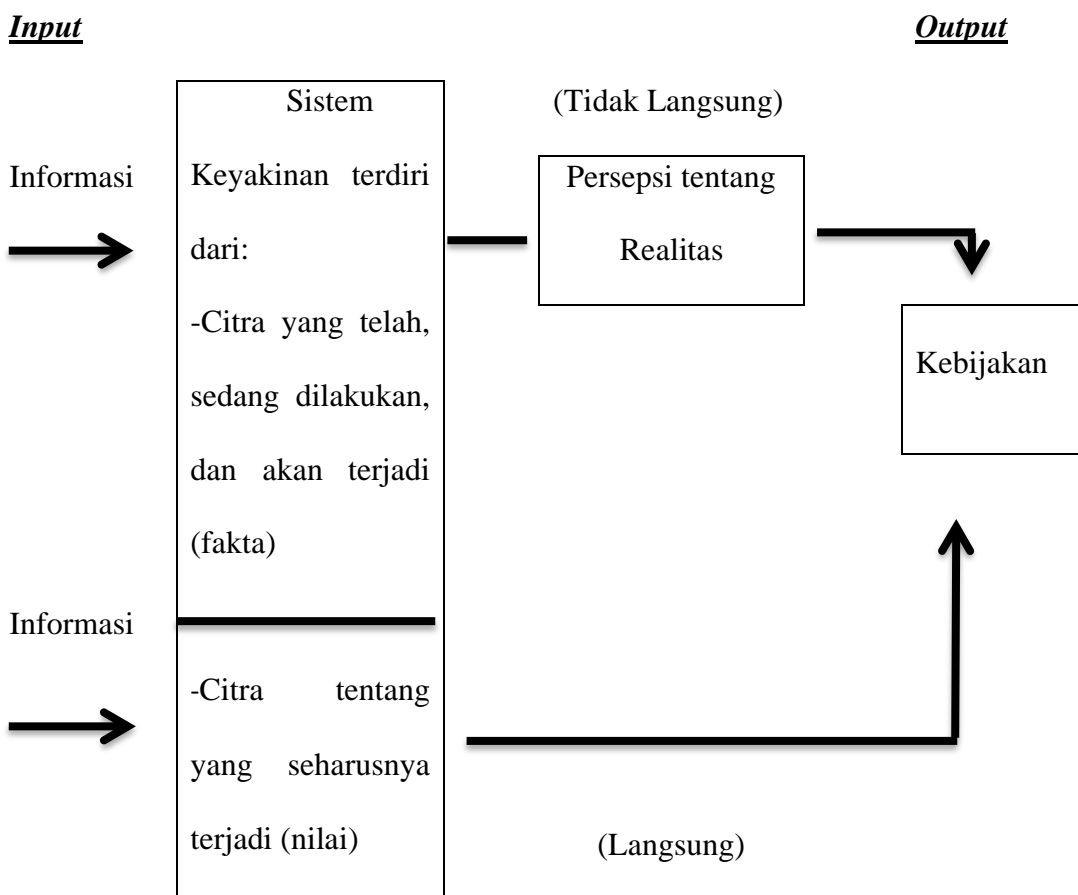
Holsti menjabarkan faktor-faktor yang ada sebagai berikut:

1. Sistem keyakinan (*belief system*). Faktor ini diartikan sebagai apa yang dipercayai dan diyakini oleh pembuat keputusan mengenai aktor lain ataupun situasi tertentu yang dihadapinya.
2. Citra (*image*) adalah potret atau penggambaran situasi terkait individu maupun negara. Citra negara dapat didefinisikan sebagai citra nasional berdasarkan kebijakan apa yang ditetapkan oleh negara berdasarkan situasi yang dihadapi oleh negara tersebut. Citra memiliki keterkaitan dengan sistem keyakinan, yakni keyakinan dalam diri seorang pemimpin secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh citra yang melekat pada negara.

Terkait bagaimana individu mengelola persepsinya untuk kemudian diekspresikan dalam sebuah kebijakan, Holsti menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk pola hubungan antara sistem keyakinan, citra dan keputusan. Pertama adalah hubungan tidak langsung. Disini, informasi yang didapatkan oleh pemimpin lewat peristiwa maupun pengalaman yang telah berlangsung atau dialami olehnya secara tidak langsung akan membentuk persepsi pemimpin akan suatu hal dan mempengaruhi kebijakan yang akan ia ambil. Kedua adalah hubungan langsung, dimana pemimpin akan mendapatkan informasi yang secara kontan mempengaruhinya untuk mengambil suatu kebijakan pada saat itu juga.

Input informasi, sistem keyakinan terkait realitas serta keadaan lingkungan sekitar itulah yang membangun persepsi individu dalam proses pengambilan

kebijakan guna merespon isu yang tengah terjadi. Citra negara dan individu akan mempengaruhi keyakinan individu, dan begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, sistem keyakinan akan mempengaruhi pembentukan persepsi individu sebagai penentuan referensi dalam proses penetapan kebijakan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Lebih lanjut, nilai disebut juga sebagai suatu kecenderungan untuk membandingkan satu kebijakan yang diambil dengan kebijakan lain yang sudah ada sebelumnya.<sup>21</sup>



Gambar 1.1

Bagan hubungan antara sistem kepercayaan dan pengambilan keputusan.

<sup>21</sup> Holsti, O. R. (2006). *Making American foreign policy*. New York: Routledge.

Xi Jinping yang merupakan presiden China pada saat ini memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan termaksud dalam mengambil keputusan untuk mempertahankan Taiwan menjadi dari bagianya. Dalam hal ini Xi menggunakan teori *Alternatif Belief System* untuk menekan Taiwan melalui kebijakan luar negri yang agresif dan menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari identitas nasional China. Sebagai presiden China Xi Jinping telah memiliki berbagai pengalaman dalam pemerintahan dan melihat langsung perkembang China mengenai isu penyatuan Taiwan dari masa pemerintahan Deng Xioping. Xi Jinping mengikuti pendekatan mendasar yaitu memprioritaskan pencegahan kemerdekaan de jure Taiwan dengan cara Xi semakin menekankan penguatan kerangka strategis keijakan luar negrinya untuk meneruskan warisan politik penyatuan China-Taiwan.

Alur gerak agresifitas kebijakan luar negeri China terhadap Taiwan dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari ketegangan hubungan China-Taiwan atas terpilihnya Tsai Ing-Wen sebagai presiden Taiwan yang Pro-kemerdekaan, kedua penolakan Taiwan terhadap konsep Konsensus 1992 China dan Taiwan tidak mengakui *One China Principle*, serta kedekatan Amerika Serikat dan dukunganya terhadap Taiwan dan Xi Jinping menginginkan posisi strategis Taiwan untuk memenuhi berbagai kepentingan China. Dengan ini China telah menggunakan berbagai taktik dalam mempertahankan Taiwan. Melalui agenda-agenda politik dan agresivitas kebijakan-kebijakan China dibawah kepemimpinan Xi Jingping penyatuan China-Taiwan harus tercapai.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

#### **1.6.1.1 Eksplanatif**

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dengan metode eksplanatif yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi, serta menggunakan teori sebagai alat untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Penelitian dengan metode eksplanatif yaitu penelitian yang tujuan penelitian eksplanatif adalah untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan "mengapa (*why*)".<sup>22</sup>

#### **1.6.2 Tingkat Analisis**

Peneliti memposisikan penelitian ini berdasarkan pembagian antara unit analisa dan unit eksplanasi. Dalam penelitian ini, unit analisa atau variabel dependennya adalah Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping, sedangkan unit eksplanasi atau variabel independennya adalah perilaku negara sebagai pengambil kebijakan (*decision maker*). Lalu peneliti memposisikan penelitian ini pada Negara Taiwan tingkat analisa negara yang dikenal dengan nama analisa karena unit Korelasionis eksplanasinya berada pada tingkat yang sama dari unit analisisnya. Dengan demikian penelitian ini berada pada tingkat analisa negara yang mengacu pada Pengaruh Agresifitas Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan mendesain kebijakannya.

---

<sup>22</sup> W. Gulo. 2000. Hakikat Ilmu dan Penelitian. Metodologi Penelitian. Grasiondo

### **1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun batasan atau ruang lingkup dari penelitian ini berdasarkan alokasi waktunya penulisan proposal ini dibatasi pada era pemerinthan Xi Jinping 2013-2021 agar penulisan proposal ini tidak terlalu melebar. Tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan menggunakan data diluar jangkauan penelitian, namun ini hanya sebagai referensi atau catatan saja.

### **1.6.4 Tehnik Dan Alat Pegumpulan Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen artikel, jurnal, surat kabar dan internet. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan literatur berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas berupa buku, dokumen, jurnal, artikel dari internet maupun media cetak.

### **1.7 Hipotesa**

Dari uraian di atas penulis menarik hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini yakni Xi dengan agresifitas kebijakan Luar negerinya menjadi lebih mendesak dalam seruannya untuk penyatuan. Ia telah beralih dari kerja sama antar China-Taiwan ke penekanan agersifitas kebijakan luar negerinya terhadap Taiwan dengan penyatuan sebagai tujuannya. Xi dengan *Belief System* ini berusaha mencapai penyatuan saat ia masih menjadi pemimpin China penyatuan Taiwan sebagai misi inti mengingat sejarah sepanjang serta identitas nasional yang melekat setiap pemimpin PKC yang telah mencita-citakan penyatuan China

Taiwan. Penyatuan merupakan penting bagi Xi prioritasnya yang jelas adalah untuk mencapai Impian China sesuatu yang secara eksplisit oleh China dibawah Xi Jinping kepada Taiwan yang selama ini dianggap sebagai tujuan yang terpisah.

Taiwan saat ini dalam pendekatannya terhadap hubungan lintas-Selat dapat mengarah pada mempertahankan status quo. Tsai sejauh ini menolak untuk menggunakan Konsensus 1992 yang mana fondasi hubungan China-Taiwan adalah pengakuan inti dari Konsensus 1992 bahwa kedua sisi Selat Taiwan milik satu China. Kekhawatiran terhadap kesabaran China dibawah kepemimpinan Xi mungkin telah menetapkan jadwal untuk penyatuan untuk memaksa Taiwan menerima persyaratannya. China sudah menanggukkan semua pertukaran resmi dengan Taiwan dan mengingat kondisi ini menjadi sangat jelas adalah masa depan stabilitas dan penyatuan untuk China-Taiwan.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini membuat sistematika penulisan yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada BAB ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi dilanjutkan dengan pertanyaan rumusan masalah, *literature riviw*, teori, metode penelitian, dan diakhiri dengan hipotesa.

BAB II Dinamika Hubungan China-Taiwan (1949-2012), pada BAB ini membahas mengenai sejarah pemisahan China-Taiwan dilanjutkan membahas mengenai dinamika konfflik China-Taiwan pasca kemerdekaan, kemudian periode



sasi pasang surut hubungan China-Taiwan dimulai dari masa kepemimpinan Presiden China Deng Xioping, Jiang Zemin, dan Hu Jintao.

BAB III Babab Baru Hubungan China-Taiwan Dimasa Kepemimpinan Xi Jinping, pada Sub BAB pertama ini membahas Xi Jinping dan kebijakan luar negeri terhadap hubungan Taiwan meliputi realisasi mempertegas Konsensus 1992 dan One China Principle, selanjutnya membahas mengenai penggunaan instrument militer China sebagai upaya menekan Taiwan, kemudian membahas mengenai respon Taiwan terhadap ketegasan kebijakan luar negeri Xi Jinping dengan respon Taiwan dimasa kepemimpinan Ma Ying-Jeou dan Tsai Ing-Wen.

BAB IV Analisis Ketegsan Kebijakan Luar Negeri China Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan Dimasa Kepemimpinan Xi Jinping, pada bagian Sub BAB pertamma membahas mengenai Rasionalitas kebijakan luar negeri China terhadap Taiwan melalui Taiwan dan wacana identitas nasional dan rasionalitas Xi Jinping terhadap isu penyatuan Taiwan, selanjutnya membahas mengenai pengaruh ketegasan kebijakan luar negeri China terhadap stabilitas hubungan China-Taiwan meliputi dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan dan terpilihnya Tsai Ing-Wen, kemudian proyeksi masa depan kebijakan China terhadap Taiwan dimasa kepemimpinan Xi Jinping.

BAB V Penutup, pada BAB ini memaparkan secara keseluruhan kesimpulan dari penelitian skripsi ini